

## **Analisis Kebijakan Pangan dan Agribisnis di Indonesia: Kajian Literatur dan Komparasi Sensus Pertanian (ST) 2013 dan ST 2023**

### ***Analysis of Food and Agribusiness Policy in Indonesia: Literature Review and Comparison of The Agricultural Census 2013 and 2023***

**Frendy Ahmad Afandi**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

#### **ABSTRAK**

Sektor pertanian pada tahun 2023 menjadi basis ekonomi nasional terbesar ketiga setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, yaitu sebesar 12,53% dari PDB nasional dengan pertumbuhan sebesar 1,3%. Adapun jika dilihat dari kerangka agribisnis, maka sumbangan agribisnis terhadap perekonomian nasional diperkirakan sebesar 27,37% dari PDB nasional. Pangan dan agribisnis sudah semestinya dapat memakmurkan pelaku utamanya, yaitu petani. Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak petani yang belum sejahtera/ mayoritas masih hidup di bawah garis kemiskinan. *Gap* empirisnya adalah sudah banyak dilakukan kajian terkait kebijakan pangan dan agribisnis namun efektivitasnya belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu sebagai landasan *evidence based* dalam pengambilan kebijakan berikutnya. Melihat besarnya, peran pangan dan agribisnis terhadap perekonomian maka perlu dilakukan analisis komprehensif (hasil-hasil kajian sebelumnya yang dirangkum ke dalam satu tulisan) terhadap kebijakan pangan dan agribisnis di Indonesia. Tujuan kajian ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan pangan dan agribisnis berdasarkan *evidence based* analisis-*analisis* kebijakan yang ada sebelumnya yang dirangkum menjadi satu. Teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah ini adalah Teori Nudge dimana pengambilan keputusan oleh manusia dapat dipengaruhi oleh dorongan kecil yang tidak disadari (dalam hal ini penyajian kajian brief). Metode yang digunakan adalah literatur review dari hasil Sensus Pertanian 2023 dan Sensus Pertanian 2013 serta dari berbagai buku dan jurnal terkait. Hasilnya adalah pemerintah perlu melakukan peremajaan secara terukur pada tanaman perkebunan dan memperkuat agribisnis komoditas pangan yang masih besar nilai impornya namun berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, seperti jagung, susu, dan gula. Kebaruan dari penelitian ini adalah dilakukan komparasi hasil terbaru sensus pertanian 2023 dan sensus pertanian 2013 berdasarkan analisis kebijakan dan sistem pangan. Kesimpulannya, pemerintah perlu mencari alternatif komoditas perkebunan lainnya sebagai penapis kelapa sawit dalam menopang ekonomi nasional, mempercepat penyediaan bahan baku bagi industri agro yang masih *under utility*, dan menerapkan konsep pertanian regeneratif.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pangan dan Agribisnis, Sistem Pangan, Peremajaan Tanaman Perkebunan, Pertanian Regeneratif

## ABSTRACT

*In 2023, the agricultural sector became the third largest national economic base after the processing industry sector and the trade sector, namely 12.53% of national GDP with growth of 1.3%. Meanwhile, if viewed from the agribusiness framework, the contribution of agribusiness to the national economy was about 27.37% of national GDP. Food and agribusiness should give the prosperity to the main actors (farmers). However, in reality there are many farmers who still live below the poverty line. The empirical gap in this study is many studies have been carried out regarding food and agribusiness policies but their effectiveness are questionable in its utility as an evidence-based basis for policy making. Seeing the large role of food and agribusiness in the economy, it is necessary to carry out a comprehensive analysis (results of previous studies summarized in one article) of food and agribusiness policies in Indonesia. The aim of this study is to provide food and agribusiness policy recommendations based on evidence-based analyzes of previous policies in the summarized form. The theory used to explain this problem is Nudge Theory where human decision making is irrational which can be influenced by nudge (in this case the presentation of the brief study). The method used is a literature review of the results of the 2023 Agricultural Census and 2013 Agricultural Census as well as from various related books and journals. The result is that the government needs to carry out measurable rejuvenation of plantation crops and strengthen the agribusiness of food commodities that still have a large import value but have the potential to be developed in Indonesia, such as corn, milk and sugar. The novelty of this research is that a comparison of the latest results of the 2023 agricultural census and the 2013 agricultural census was carried out based on policy and food system analysis. In conclusion, the government needs to look for alternative plantation commodities as palm oil filters to support the national economy, accelerate the supply of raw materials for agro industries that are still underutilized, and apply the concept of regenerative agriculture.*

**Keywords:** *food and agribusiness policy, food systems, plantation plant rejuvenation, regenerative agriculture*

## A. Pendahuluan

Tulisan ini menganalisis kebijakan pangan dan agribisnis yang telah diterapkan pada dekade sebelumnya berdasarkan analisis tematik yang telah dilakukan berdasarkan ST 2013. Hal ini menjadi penting karena dilakukan review terhadap hasil kajian atau riset-riset sebelumnya untuk menjadi *lesson learnt* dalam pengambilan kebijakan pangan dan agribisnis ke depannya. Hal tersebut belum banyak dilakukan oleh kajian-kajian/penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga pertanyaan dari penelitian ini dapat menjawab apakah kebijakan pangan dan agribisnis yang dilakukan selama ini sudah dilakukan berdasarkan hasil kajian tematik dari ST 2013 sehingga kebijakan yang diambil berdasarkan *evidence based*.

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2023 relatif baik (Bappenas 2024). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,03% (*year on year- perbandingan dari tahun ke tahun/ yoy*), inflasi 2,61% (*yoy*), neraca perdagangan surplus sebesar USD 36,93 M, investasi mencapai Rp 1.418,9 Triliun, tingkat suku bunga 5,81%, indeks keyakinan konsumen 124,4, dan indeks Purchasing Managers Index (PMI) sebesar 52,07. Salah satu sektor yang berperan penting terhadap perekonomian nasional adalah pertanian. Kerangka yang lebih luas dari itu, sistem agribisnis yang mencakup subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem jasa penunjang memiliki peran yang lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional.

Pektor sektor pertanian (12,53% PDB) dan agribisnis (27,37% PDB) yang besar seharusnya dapat memakmurkan pelaku utamanya (petani). Namun

kenyataannya, banyak petani yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,95 juta (61,32 persen diantaranya bertempat tinggal di desa dan umumnya bekerja sebagai petani) (Bappenas 2018).

Gap empiris yang terjadi adalah banyaknya kajian kebijakan pangan dan agribisnis namun efektivitasnya belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu sebagai landasan *evidence based* dalam pengambilan kebijakan berikutnya. Melihat besarnya, peran pangan dan agribisnis terhadap perekonomian maka perlu dilakukan analisis komprehensif (hasil-hasil kajian sebelumnya yang dirangkum ke dalam satu tulisan) baik secara teoritis, praktis, dan sosial terhadap kebijakan pangan dan agribisnis di Indonesia.

Sektor pertanian menjadi sektor penyerap tenaga kerja paling tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya, yaitu sebesar 40,69 juta orang atau 29,36% dari total tenaga kerja pada Februari 2023. Sehingga sektor pertanian merupakan sektor ekonomi penting untuk menjaga inflasi, penyerap tenaga kerja, penyedia bahan baku industri, mendukung penyediaan energi hijau, dan menjadi salah satu sumber utama penghasil devisa.

Pembangunan pertanian saat ini menggunakan pendekatan Sistem Pangan. Sistem pangan mencakup seluruh jajaran pelaku dan aktivitas nilai tambah yang saling terkait yang terlibat dalam produksi, agregasi, pengolahan, distribusi, konsumsi dan pembuangan produk pangan yang berasal dari pertanian, kehutanan atau perikanan, dan bagian dari ekonomi yang lebih luas, lingkungan sosial dan alam di tempat ditanamnya. Pendekatan ini

bersesuaian dengan pendekatan sistem agribisnis.

Perdebatan teoritis yang menjadi dasar kajian ini adalah perbedaan cara pandang antara pertanian dan agribisnis sebagaimana yang dikemukakan Saragih (2010), Trevors dan Saier (2010), Kindangen dkk (2023). Sistem agribisnis memandang pertanian tidak hanya secara sempit, yaitu hanya melihat subsistem usahatani, tetapi juga dilihat secara luas dari hulu hingga hilir dan subsistem pendukungnya. Cara pandang ini merubah dari pendekatan subsistem menjadi sistem dan dari pendekatan efisiensi produksi ke efisiensi bisnis dan pemasaran yang berkelanjutan.



**Gambar 1.** Lingkup Sistem dan Usaha Agribisnis

Sumber: Rachmina (2015)

Pendekatan sistem agribisnis mencakup 4 subsistem. Pertama, subsistem agribisnis hulu/ industri hulu pertanian (*up-stream agribusiness*), yaitu usaha-usaha yang menghasilkan barang-barang modal dan input bagi pertanian seperti usaha pembibitan-perbenihan, agro-kimia (pupuk, pestisida, obat vaksin hewan, aditif pakan, dan probiotik) dan agro-otomotif (alat dan mesin pertanian). Kedua, subsistem usaha tani-pertanian (*on farm-agribusiness*), yaitu usaha-usaha yang menggabungkan barang-barang modal sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia dalam proses produksi flora-fauna untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Ketiga, subsistem agribisnis hilir/ industri hilir pertanian (*down-stream agribusiness*), yaitu usaha-usaha yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan sesuai kebutuhan pasar, seperti industri makanan dan minuman, industri pakan, industri serat alam, farmasi, estetika, energi alternatif, militer dan pertahanan. Keempat, subsistem penyedia jasa bagi agribisnis (*services for agribusiness*), yaitu usaha-usaha yang menyediakan jasa bagi ketiga subsistem agribisnis, seperti pembiayaan, perkreditan, asuransi, transportasi, pengangkutan, pergudangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan kebijakan ekonomi (makro, mikro, dan perdagangan internasional).

Cara pandang baru dalam melihat pertanian menjadi sistem agribisnis membutuhkan pendekatan baru untuk melihat pelakunya. Jika pertanian membutuhkan petani sebagai pelaku usahatani, maka sistem agribisnis membutuhkan wirausaha agribisnis sebagai pelaku dalam sistem dan usaha agribisnisnya. Bentuk kewirausahaan baik *sociopreneur* maupun *technopreneur* menjadi penting dalam sistem dan usaha agribisnis.

Meskipun hasil sensus pertanian (ST) 2023 telah keluar dan hasil ST 2013 telah tersedia, namun belum ada yang melakukan analisisnya dari pendekatan pangan dan agribisnis serta memanfaatkannya dalam pemberian rekomendasi kebijakan pangan dan agribisnis yang komprehensif. Oleh karena itu, dilakukan analisis pangan dan

agribisnis di Indonesia berdasarkan hasil ST 2013 dan 2023.

*Theoretical gap* dalam penelitian ini adalah pembangunan pertanian yang melihatnya dari perspektif “*on farm*”. Jika menggunakan pendekatan pertanian, maka sumbangan sektor pertanian terhadap PDB nasional hanya 12,53% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 30% adapun jika digunakan kerangka sistem agribisnis maka sumbangan terhadap PDBnya menjadi lebih dari dua kali lipat, yaitu sebesar 27,27% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 42,2%. Pembangunan pertanian harus merevitalisasi kembali pendekatan Sistem Agribisnis yang dikombinasikan dengan Sistem Pangan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang melakukan analisis kebijakan pertanian di antaranya Alta dkk (2023) yang menyebutkan peningkatan produktivitas pertanian masih penting agar petani dapat keluar atau menghindari kemiskinan; Sudaryanto dkk (2016) menyebutkan dukungan terhadap sektor pertanian dalam bentuk perlindungan harga dan pembatasan impor berdampak pada peningkatan harga pangan di tingkat konsumen yang pada akhirnya menurunkan asupan gizi, dalam jangka panjang prioritas kebijakan yang lebih efektif adalah meningkatkan produktivitas melalui sistem inovasi, pembangunan infrastruktur, dan mempermudah investasi swasta; Rahayu (2020) menyebutkan perlu dilakukan pengembangan agribisnis berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah yang difokuskan pada pengembangan kawasan berbasis pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang disesuaikan potensi sumberdaya alam dan peruntukan kawasan.

Riset-riset lainnya terkait analisis kebijakan agribisnis dan pertanian dari

berbagai negara di jurnal Internasional sebagai berikut. Leitao dkk (2023) menemukan bahwa kapabilitas yang tinggi menentukan kinerja agribisnis yang tinggi dimana keuntungan dari hal tersebut dapat dilihat di negara-negara berkembang. Orrego dkk (2023) menyatakan banyak kebijakan pertanian yang tidak didasarkan pada evaluasi metodologi yang berdasarkan sains dan isu kebijakan pertanian yang berkelanjutan kian menjadi penting. Popp (2021) menyatakan kebijakan tata kelola risiko pertanian di negara-negara OECD menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap institusi-institusi yang sudah mapan dan instrumen-instrumen yang mendasari paradigma kebijakan seringkali mencegah dukungan yang besar terhadap *tools* manajemen risiko sehingga tidak mengarah pada konvergensi kebijakan yang jelas. Wuepper dkk (2024) melakukan kajian kebijakan pertanian-lingkungan sebanyak 6.124 kebijakan dari tahun 1960-2022 dari 200 negara dengan bahwa bahwa tipe-tipe kebijakan pertanian-lingkungan sangatlah luas termasuk skema regulasi dan pembayaran dengan tujuan baik konservasi biodiversitas, penggunaan pestisida yang lebih aman, dan pengurangan polusi nutrisi.

Dari berbagai riset terdahulu, teori yang digunakan berkisar pada pembangunan pertanian dari sudut pandang “*on farm*” (revolusi hijau) dan sistem agribisnis. Setelah mencermati berbagai hasil penelitian terdahulu, konsep dan teori tersebut dirasakan masih kurang, karena saat ini sudah berkembang teori sistem pangan (termasuk didalamnya ekonomi biru, pangan biru, dan ekonomi sirkular). Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan sebaiknya merevitalisasi pendekatan sistem agribisnis yang dikombinasikan dengan sistem pangan.

## B. Rumusan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan pangan dan agribisnis berdasarkan penelitian berbasis bukti dari analisis-*analisis* kebijakan yang ada sebelumnya yang dirangkum menjadi satu. Teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagaimana telah disebutkan pada bagian akhir pendahuluan menunjukkan bahwa pembangunan pertanian ke depan perlu menggunakan pendekatan revitalisasi sistem agribisnis yang dikombinasikan dengan sistem pangan.

Pangan dan agribisnis Indonesia silih berganti memiliki komoditas unggulan. Pada zaman Belanda komoditi gula, karet, rempah-rempah, kelapa, dan teh pernah menyumbang nilai ekonomi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, saat ini komoditas-komoditas tersebut produktivitasnya menurun dan tidak memiliki daya saing kembali. Bahkan, beberapa di antaranya Indonesia menjadi importir terbesar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun industrinya.

Saat ini Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia, bukan tidak mungkin kisah yang sama terkait komoditas di atas terjadi kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan kondisi produk-produk unggulan perkebunan yang memerlukan peremajaan agar dapat berkelanjutan, dan memetakan evaluasi kebijakan pangan dan agribisnis yang telah dikaji untuk perbaikan ke depannya berdasarkan hasil ST 2013 dan 2023 serta berbagai literatur terkait. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil ST 2013 dan 2023 dalam bentuk kebijakan pangan dan agribisnis dengan

menggunakan analisis konten/ literatur *review*.

## C. Metode Penelitian.

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi berbasis *literature review* (hasil analisis tematik dari ST 2013, jurnal nasional dan internasional yang terkait, dan hasil dari ST 2023) sebagaimana pendekatan yang serupa digunakan Wuepper dkk (2024) dan Orrego dkk (2023). Paradigma penelitian yang relevan dengan desain penelitian ini adalah Sistematis *Review* dan Meta-analisis. Literatur utama yang digunakan adalah hasil ST 2013, berbagai analisis kebijakan dari hasil ST 2013, dan ST 2023. Prosedur utamanya adalah melakukan komparasi ST 2013 dengan ST 2023 dan menganalisisnya berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian analisis tematik ST 2013.

Pengayaan pembahasan dilakukan berdasarkan konteks kebijakan pangan dan agribisnis yang aktual yang menjadi isu pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Bidang Perekonomian. Selain itu juga diperkuat dengan isu-isu aktual yang ada pada media massa nasional seperti koran Kompas. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah *in depth interview*. *In depth interview* dilakukan dengan berdiskusi dengan pakar di bidangnya dengan metode *purposive sampling*. Wawancara mendalam perlu dilakukan agar analisis yang dilakukan menemukan konteksnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih bumi, tidak semata-mata hanya berdasarkan hasil tulisan publikasi saja, serta dapat menjangkau permasalahan aktual yang tidak dibahas pada data sekunder.

### D. Pembahasan

Substansi hasil penelitian yang sudah diperoleh utamanya adalah terdapat beberapa hal rekomendasi kebijakan dari hasil analisis tematik ST 2013 namun belum menjadi dasar pijakan pada pengambilan kebijakan pangan berikutnya. Padahal pengambilan kebijakan berbasis bukti menjadi sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan yang diambil. Rincian ringkas hasil analisis tematik ST 2013 akan dijelaskan pada penjelasan subbab berikutnya.

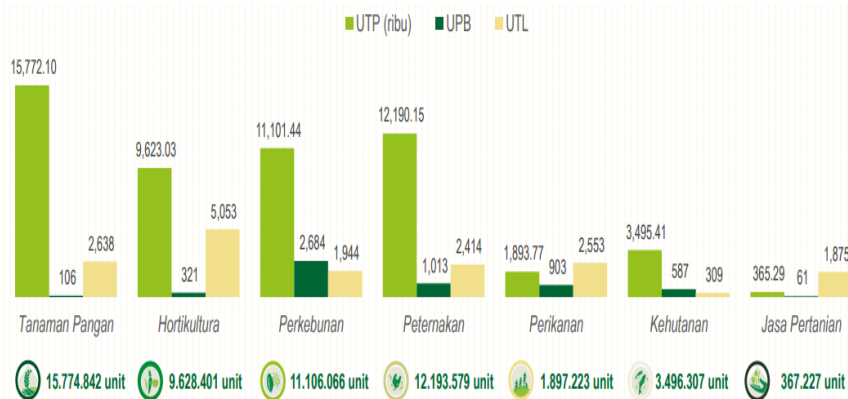
Hal yang perlu menjadi catatan dari Sensus Pertanian 2023 adalah adanya penurunan rumah tangga usaha pertanian (RTUP) di seluruh subsektor dan terjadi peningkatan jumlah petani di atas umur lebih dari atau sama dengan 55 tahun dibandingkan dengan Sensus Pertanian 2013. Padahal menurut hasil analisis ST 2013 juga terjadi penurunan RTUP dan semakin menuanya umur petani. Penurunan terbesar adalah subsektor kehutanan, yaitu berkurang 3,31 juta rumah tangga, disusul dengan subsektor tanaman pangan yang berkurang 2,18 juta rumah tangga, dan subsektor perkebunan yang berkurang 1,89 juta rumah tangga. Selain itu, RTUP Gurem (penguasaan lahan < 0,5 ha) meningkat

cukup signifikan yaitu dari 14,12 ribu rumah tangga (ST 2013) menjadi 16,89 juta rumah tangga (ST 2023), atau meningkat sekitar 15,64 persen. Jumlah petani milenial berdasarkan ST 2023 sebanyak 16,78 juta orang.

Sektor Pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan domestik maupun regional, seperti isu keberlanjutan, emisi gas rumah kaca, krisis pangan dan EUDR yang diinisiasi Uni Eropa.

#### a. Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor

Usaha pertanian masih didominasi oleh Usaha Pertanian Perorangan (UTP). Jumlah usaha pertanian terbanyak di subsektor tanaman pangan. UTP mendominasi usaha pertanian di semua subsektor, di mana UTP terbanyak terdapat di Subsektor Tanaman Pangan, yakni mencapai 15,77 juta unit usaha. Usaha pertanian berbadan hukum (UPB) terbanyak terdapat di Subsektor Perkebunan, yakni mencapai 2.684 unit usaha. Usaha pertanian lainnya (UTL) terbanyak terdapat di Subsektor Hortikultura, yakni mencapai 5.053 unit usaha.



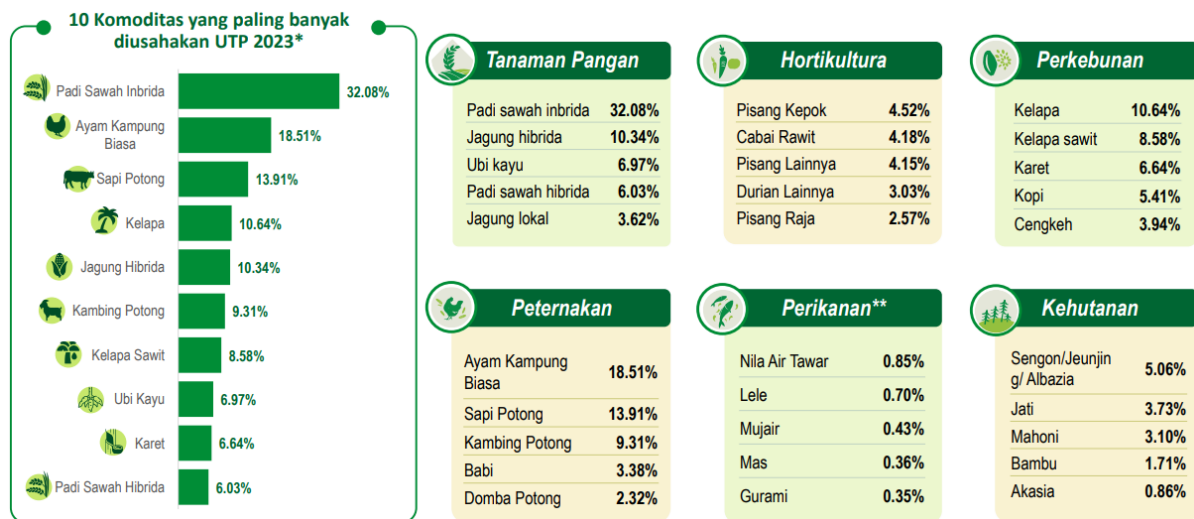
**Gambar 2.** Jumlah Usaha Pertanian Menurut Subsektor 2023

Sumber: BPS (2023)

UTP paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 5.676.717 unit atau mencakup 19,35% dari total UTP di Indonesia. UPB paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 637 unit atau 11,17 persen dari UPB di Indonesia. UTL paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 2.324 unit atau 17,98 persen dari UTL di Indonesia.

### b. Komoditas yang Paling Banyak Diusahakan oleh UTP di Indonesia

Komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di wilayah Pulau Jawa adalah tanaman pangan, khususnya padi sawah inbrida. Sementara itu, komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan adalah komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet.



Gambar 3. Komoditas yang Paling Banyak Diusahakan oleh UTP di Indonesia

Sumber: BPS (2023)

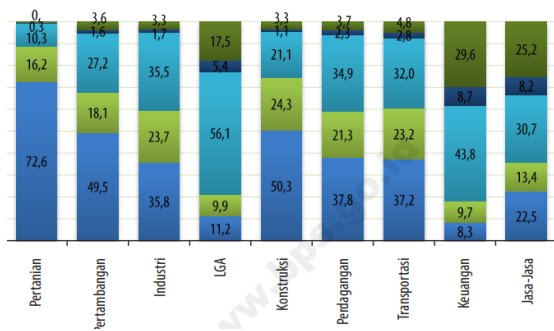
### c. Analisis Kebijakan Pertanian Kesejahteraan Petani

BPS pada tahun 2014 menerbitkan buku Analisis Kebijakan Pertanian Indonesia, Implementasi dan Dampak terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian 2013. Proporsi pendapatan yang bersumber dari kegiatan petani sebesar 36,76% di tahun 2013. Variabel kebijakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani adalah bantuan pupuk dan penyuluhan budidaya sedangkan bantuan bibit/benih/induk secara signifikan berpengaruh negatif (BPS 2014a). Argumennya adalah karena bantuan pupuk dapat mengurangi biaya input produksi,

penyuluhan meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani dalam proses budidaya, sedangkan bantuan benih yang khusus diberikan kepada RTUP sektor tanaman padi+palawija, dimana tingkat kesejahteraan RTUP-nya masih jauh di bawah rata-rata tingkat kesejahteraan RTUP sub sektor pertanian lainnya.

Analisis dari Program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis IPB menemukan bahwa petani dengan pendidikan menengah berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani (NTP) (BPS 2014a). Petani dengan pendidikan menengah ke atas sumber pendapatan utamanya bukan lagi bersumber pada sektor pertanian (Gambar 4) (BPS 2014a). Diperlukan kebijakan

peningkatan kesejahteraan petani dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan meningkatnya daya tarik sektor lain.



**Gambar 4.** Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Pendidikan.

Sumber: BPS (2014a)

Berdasarkan analisis kebijakan ST 2013, subsektor perikanan menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga yang signifikan dan direkomendasikan agar kebijakan dan pengembangan pada sektor ini perlu ditingkatkan agar hasilnya optimal. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan yang positif terkait PDB perikanan dan peternakan pada tahun 2023 dibandingkan subsektor lainnya, yaitu sebesar 5,49% dan 3,71%.

**d. Analisis Sosial Ekonomi Petani**

BPS pada tahun 2014 menerbitkan buku Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia, Hasil Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Sensus Pertanian 2013. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk-produk pertanian akan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Sektor pertanian belum memberikan kesejahteraan kepada petani karena pendapatan yang diciptakan pertanian masih rendah, upah yang diterima petani masih rendah dan secara riil cenderung turun, namun sektor ini mampu

menyerap tenaga kerja Indonesia yang cukup besar (sepertiga tenaga kerja Indonesia). Lebih dari 70% petani hanya bersekolah sampai SD dan kebanyakan dilakukan oleh yang berusia tua. Rata-rata pendapatan petani sebesar Rp 2,2 juta per bulan dan sumbangan dari usaha pertanian hanya sebesar Rp 1 juta per bulan. Petani perlu mencari tambahan penghasilan dari luar usaha pertanian. Lahan beririgasi cenderung turun sedangkan lahan non-irigasi meningkat. Sebagian besar tanah yang dimiliki petani hanya berupa girik atau akta jual beli notaris/ PPATK. Hanya kurang lebih seperlima petani yang mempunyai sertifikat. Lebih dari sepertiga lahan yang dimiliki petani tidak memiliki surat bukti kepemilikan. Lebih dari 80% petani masih mengandalkan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan usahanya. Padahal data menunjukkan petani yang menggunakan fasilitas kredit bank memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menggunakan fasilitas kredit bank.

Kelembagaan petani seperti kelompok tani hanya dimanfaatkan sekitar 30% oleh petani. Sedangkan program pemerintah berupa penyuluhan pertanian hanya diikuti oleh 20% petani. Padahal data menunjukkan bahwa dengan mengikuti kelompok tani maupun penyuluhan pertanian berpotensi meningkatkan pendapatan usaha pertanian. Akses terhadap sarana produksi (saprodi) masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Penyediaan saprodi belum menjangkau semua petani sehingga petani mengalami kesulitan untuk memperoleh saprodi karena harganya mahal. Sebagian petani juga mengalami kesulitan menjual hasil panen karena harganya rendah.

### **e. Ketahanan, Kemandirian, dan Keadaulatan Pangan Indonesia**

BPS pada tahun 2015 menerbitkan buku Analisis Tematik ST 2013 Subsektor Ketahanan, Kemandirian, dan Keadaulatan Pangan Indonesia. Hasil analisis *Policy Analysis Matrix* (PAM) menunjukkan bahwa 3 komoditas, yaitu padi, tebu, dan daging sapi memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara ekonomi, peningkatan *supply* ketiganya untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih menguntungkan jika dilakukan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri daripada melakukan impor.

Analisis PAM juga menunjukkan kebijakan pemerintah dalam perlindungan harga output produsen pada ketiga komoditas belum tercermin. Manfaat ekonomi yang diterima oleh produsen akibat kebijakan harga dari pemerintah (harga input dan harga output) lebih kecil daripada yang diterima konsumen/distributor. Pada ketiga komoditas tersebut terjadi 'politik tekan harga'.

Penduduk pedesaan Indonesia yang tahan pangan sekitar 23,29%. Untuk mewujudkan kemandirian dan keadaulatan pangan pemerintah perlu menetapkan cadangan pangan nasional. Hasil studi menunjukkan bahwa keadaulatan pangan belum tercapai. Upaya ketahanan pangan yang dilakukan masih terfokus pada ketersediaan dan konsumsi dan belum berorientasi pada sisi produksi, kemandirian, dan keadaulatan pangan. Ketersediaan pangan seharusnya lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, baru kemudian distribusi/ aksesibilitas dan konsumsi.

Beberapa rekomendasi kebijakan terkait hal ini adalah kebijakan peningkatan produksi domestik untuk padi, jagung, dan daging sapi sebaiknya menjadi prioritas daripada melakukan impor. Kedua, sumber daya pertanian di Jawa harus dipertahankan misalnya melalui regulasi perlindungan lahan. Ketiga, harga produk petani harus diberi proteksi pada tingkat yang layak, misalnya dengan menetapkan HPP tepat waktu dan optimasi fungsi BULOG. Keempat, sebagian subsidi input misalnya subsidi pupuk organik sebaiknya dialihkan kepada subsidi output untuk menjamin kelayakan harga yang diterima petani.

### **f. Transformasi Struktural Usaha Tani dan Petani Indonesia**

BPS pada tahun 2015 menerbitkan buku Analisis Tematik ST 2013 Subsektor Transformasi Struktural Usahatani dan Petani Indonesia. Hasil analisis menunjukkan subsektor perikanan dapat dijadikan pertumbuhan baru sehingga strategi kebijakan pengembangan perikanan perlu dirancang lebih baik dan dapat dirasakan langsung nelayan. Diperlukan program penyediaan benih unggul bagi pembudidaya ikan. Selain itu juga diperlukan revitalisasi kelembagaan nelayan skala kecil dan pembudidaya ikan skala kecil.

Perubahan struktural di sektor pertanian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal, khususnya pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan dibandingkan faktor eksternal yaitu pertumbuhan sektor industri (BPS 2015b). Hal tersebut dibuktikan dengan data analisis Daryanto dkk (2015) di dalam BPS (2015b) yang menduga transformasi struktural sebagai resultan dari transformasi yang terjadi pada usahatani dan petani

(faktor internal) dan faktor eksternal yaitu PDRB sektor ekonomi lainnya. Hasilnya untuk faktor internal didapatkan hasil estimasi model cukup representatif dalam menggambarkan faktor-faktor internal yang menjadi determinan transformasi struktural dengan *goodness of fit* ( $R^2$ ) yang cukup baik, *P-value* untuk *F-stat* < 0,001; dan *R-squared* ( $R^2$ ) antara 55-98%. Adapun untuk faktor eksternal didapatkan hasil estimasi model (Tabel 1) yang menunjukkan pertumbuhan sektor industri belum memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan sektor pertanian yang ditandai dengan nilai prob (*F-stat*) PDRB Industri > 0,05. Pertumbuhan sektor industri belum mampu menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor pertanian. Sektor industri justru menekan pertumbuhan sektor pertanian. Oleh karena itu, pengembangan industri berbasis pertanian dan perdesaan harus menjadi strategi pembangunan ekonomi agar terdapat keterkaitan antara pengembangan sektor pertanian dan sektor industri.

**Tabel 1.** Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Proporsi PDRB Sektor Pertanian

Dependent Variable: PDRB\_PERTANIAN

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C	-2.536366	0.852008	-2.976929	0.0070
PDRB_INDUSTRI	-0.188978	0.158388	-1.193137	0.2455
INCOME_PERTANIAN	0.016809	0.093097	0.180548	0.8584
SPU_PADIPWJ	0.151887	0.062529	2.429068	0.0238
PEND_ART_ATAS	-0.718503	0.598696	-1.200113	0.2429
PDRB_TABAMA	0.599991	0.243369	2.465350	0.0220
PDRB_PERKEBUNAN	0.350926	0.145533	2.411316	0.0247
PDRB_PERIKANAN	-0.185934	0.162308	-1.145567	0.2643

Keterangan :  $R^2 = 61.4\%$ , Prob (*F-statistic*) = 0.001641

Sumber: BPS (2015b)

Kebijakan harga input, harga output, perbaikan infrastruktur dan teknologi pertanian yang lebih inovatif

sangat diperlukan. Subsidi input pertanian (pupuk, benih dan pestisida) wajib lebih tepat sasaran agar efisiensi produksi pertanian terjamin. Ketika harga komoditas perkebunan anjlok, maka kebijakan perlindungan dan mitigasi risiko usaha sangat diperlukan oleh pekebun rakyat.

Determinan utama transformasi struktural usahatani dan petani Indonesia ada dua, yaitu faktor penguasaan lahan dan pendapatan dan faktor pendidikan. Diperlukan berbagai kebijakan yang dapat membawa sektor pertanian menjadi sektor yang menarik sebagai sumber penghidupan, misalnya melalui strategi kebijakan ekonomi kreatif dan pembangunan industri pedesaan sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja baru.

### g. Efisiensi Produksi Pangan di Indonesia

BPS pada tahun 2015 menerbitkan buku Analisis Tematik ST 2013 Subsektor Estimasi Parameter dan Pemetaan Efisiensi Produksi Pangan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan efisiensi teknis usaha tani padi, jagung, dan kedelai rata-rata sudah di angka 50-80%. Faktor-faktor yang signifikan memengaruhi inefisiensi usahatani padi adalah umur petani, tingkat pendidikan petani, subsidi, irigasi, dan penyuluhan (Tabel 2, 3, dan 4) (BPS 2015c). Sedangkan keanggotaan dalam kelompok tani belum berpengaruh signifikan terhadap pengurangan inefisiensi (Tabel 2, 3, dan 4) (BPS 2015c).

Pada daerah yang sudah efisien maka peningkatan efisiensi dapat dilakukan dengan perbaikan teknologi maupun perbaikan kelembagaan produksi. Adapun pada daerah yang belum efisien, perlu dilakukan rekayasa sosial ekonomi seperti

penyuluhan dalam penggunaan pengetahuan dan sumberdaya lokal.

**Tabel 2.** Sebaran Provinsi Menurut Jenis Peubah dan Arah Pengaruh (Signifikan Positif atau Negatif) Terhadap Inefisiensi Usahatani Padi

No	Peubah inefisiensi	Signifikan dan negatif	Signifikan dan positif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Umur	Aceh, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Kepri, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel, Kaltim dan Papua Barat	Banten
2	Tingkat pendidikan	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Bengkulu, Lampung, Jabar, DIY, Jatim, Banten, NTT, Kalbar, Kalsel	Kalteng
3	Pinjaman	Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jabar, Jatim, Banten, Kaltim	Sumsel, Papua
4	Subsidi	Sumut, Sumsel, Bengkulu, Banten, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Maluku, Papua Barat	Sumbar, Jateng, Jatim, Sultra
5	Penyuluhan	Sumut, Sumbar, Sumsel, DIY, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sultra, Maluku, Papua Barat	-
6	Keanggotaan Kelompok Tani	Lampung, Jateng, Jatim, Kaltim, Sultra	Aceh, Sumbar, Jabar, NTT, Kalteng, Kalsel, Sulsel, Maluku
7	Jenis Lahan	Aceh, Sumbar, Riau, Bengkulu, Babel, Jabar, Jateng, Bali, Sulsel, Papua Barat	Sumsel, NTT, Kalsel, Maluku, Kalteng
8	Status Kepemilikan Lahan	Riau	Aceh, Sumut, Sumbar, Jateng, Jatim, Kalteng, Kalsel, Papua Barat, Sulut

Sumber: BPS (2015c)

**Tabel 3.** Sebaran Provinsi Menurut Jenis Peubah dan Arah Pengaruh (Signifikan Positif atau Negatif) Terhadap Inefisiensi Usahatani Jagung, 2014

No	Peubah inefisiensi	Signifikan dan negatif	Signifikan dan positif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Umur	Sumut, Riau, Jateng	Jatim, Bali, Jabar, Sulut, Sulsel
2	Tingkat Pendidikan	Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalsel, Sulsel, Gorontalo	-
3	Pinjaman	Aceh, Sumut, Jabar, Jatim, NTB, Kalbar, Sulteng, Sulsel	Sumsel, Lampung, Kalsel
4	Subsidi	Aceh, Sumut, Sumsel, DIY, Jatim, Bali, NTB, Kalsel, Sulsel	Riau, Jambi, Lampung, Jabar, Jateng
5	Penyuluhan	Sumbar, Sumsel, Jabar, DIY, Jatim, NTB, Kalbar, Sulteng, Sulsel	Aceh, Sumut, Lampung
6	Keanggotaan Kelompok Tani	Sumut, Jambi, Bengkulu, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Maluku	Riau, NTT, Sulut, Gorontalo
7	Pelatihan	Sumut, Sumsel, Lampung, DIY, Jatim, NTB, NTT	Riau, Bali
8	Jenis Lahan (irigasi dan bukan irigasi)	Aceh, Sumut, Riau, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, Sulsel	Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar
9	Status Lahan	Sumut, Lampung, Bali, NTT, Kaltim, Sulteng	Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Kalsel

Sumber: BPS (2015c)

**Tabel 4.** Sebaran Provinsi Menurut Jenis Peubah dan Arah Pengaruh (Signifikan Positif atau Negatif) Terhadap Inefisiensi Usahatani Kedelai, 2014

No	Peubah inefisiensi	Signifikan dan negatif	Signifikan dan positif
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Umur	Sumsel, Lampung, Bali, NTB, Kalbar	Jatim, Sultra
2	Tingkat Pendidikan	Sumsel, Jabar, DIY, Bali, NTB, Sulsel	Jatim, Kalteng
3	Pinjaman	Jateng, Bali	Papua Barat
4	Subsidi	Aceh, Jabar, Jatim, Bali, NTB, Maluku	Jambi, Papua
5	Penyuluhan	Sumsel, Jateng, Jatim, NTB, Sultra, Gorontalo, Maluku	DIY, Bali, Maluku
6	Keanggotaan Kelompok Tani	Jabar, DIY, Banten, Bali, Papua	Jatim, NTB, Sulteng, Gorontalo, Maluku
7	Pelatihan	DIY, NTB, Sulbar	Jatim, Bali
8	Jenis Lahan	Jambi, DIY, Jatim, Bali, Sultra, Sulbar, Maluku	Jateng
9	Status Lahan	Lampung, DIY, Banten, Sulbar, Maluku, Papua Barat	Jambi, Sumsel, Jatim, Gorontalo

Sumber: BPS (2015c)

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dapat dilakukan dengan bantuan pupuk, benih, dan kemudahan akses petani terhadap pinjaman modal serta alsintan. Penyaluran benih dan pupuk harus tepat guna dan sasaran. Penyediaan dan akses air irigasi, benih unggul, pupuk dan obat-obatan berkontribusi besar pada peningkatan efisiensi usaha tani tanaman pangan. Peningkatan nilai tambah dan kesempatan kerja di sektor pertanian dilakukan dengan pembukaan akses agribisnis dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di sektor tanaman pangan dan meningkatkan usaha-usaha *off farm*.

#### h. Daya Saing dan Pemetaan Peremajaan Komoditi Perkebunan

BPS pada tahun 2015 menerbitkan buku Analisis Tematik ST 2013 Subsektor Daya Saing dan Pemetaan Peremajaan Komoditi Perkebunan. Hasil analisis menunjukkan komoditas karet, kelapa sawit, teh, cengkeh dan kelapa memiliki daya saing baik secara finansial maupun ekonomi (memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif). Artinya, dengan maupun

tanpa kebijakan intervensi dari pemerintah usahatani kelima komoditas tersebut masih layak dan menguntungkan jika diproduksi. Sementara untuk kopi dan kakao lebih berdaya saing secara finansial dibandingkan ekonomi (lebih memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan komparatif). Artinya kedua komoditi tersebut layak dan menguntungkan untuk diusahakan jika ada dukungan kebijakan intervensi dari pemerintah.

Kebijakan pemerintah terhadap output maupun input mampu meningkatkan daya saing kopi dan kakao. Sementara untuk komoditas perkebunan selain itu, adanya kebijakan protektif terhadap input (adanya subsidi input *tradable*) adapun kebijakan terhadap outputnya belum mampu meningkatkan daya saingnya.

**Tabel 2.** Umur Tanaman Perkebunan di Indonesia Tahun 2013

Jenis Tanaman	Panen pertama	Umur Tanaman dewasa	Umur Produktif	Bagian yg dipanen	Rata-rata Umur Saat ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kopi	3	5-6	12-50	buah	30
Teh	3	6	50	daun	-
Kelapa sawit	3-4	8-9	35	buah	30
Karet	4-7	8-11	35	getah	25
Kakao	4-8	15-20	50	biji	25
Kelapa	4-6	8-15	60	buah	-
Cengkeh	5-7	15	50	Tunas Bunga	15

Sumber: BPS (2015d)

Peningkatan produktivitas menjadi kunci utama daya saing komoditas perkebunan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat, dan pengendalian hama dan penyakit. Daerah yang *urgens* dilakukan peremajaan perkebunan yaitu karet di Kalimantan, kopi di Sumatera, kakao di Sulawesi, dan Kelapa Sawit di Riau.

### i. Efisiensi Sistem Produksi dan Tata Niaga Hortikultura

BPS pada tahun 2015 menerbitkan buku Analisis Tematik ST 2013 Subsektor Efisiensi Sistem Produksi dan Tataniaga Hortikultura. Hasil analisis menunjukkan perlunya komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam pengembangan hortikultura terutama di luar Jawa, sebagai salah satu subsektor yang memiliki potensi ekonomi besar serta peningkatan pendapatan petani yang tinggi.

Paradigma pengembangan hortikultura bukan diarahkan ke peningkatan volume produksi namun optimalisasi nilainya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan sistem rantai nilai. Penerapan teknologi pasca panen dan penggunaan bioteknologi, serta stabilisasi harga dalam rangka pengendalian inflasi produk hortikultura perlu dilakukan. Hal tersebut didukung dengan adanya klaster-klaster bawang merah, bawang putih, dan cabai di beberapa daerah yang dikembangkan dan dibina oleh Bank Indonesia untuk menjaga inflasi pangan melalui stabilisasi pasokan (BI 2020; BI 2021).

### j. Analisis Komparasi Hasil ST 2013 dan ST 2023

Beberapa catatan penting terkait hasil sensus yang menggambarkan perkembangan pertanian Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir (2013-2023) dijelaskan sebagai berikut. Jumlah usaha pertanian perorangan menurun 7,5% (dari 31,71 juta (2013) menjadi 29,34 juta (2023)). Begitu juga jumlah rumah tangga (RT) usaha pertanian tiap subsektor. Selain subsektor kehutanan, subsektor tanaman pangan mengalami penurunan terbesar sebesar 12,3% (dari 17,73 juta RT menjadi

15,55 juta RT), diikuti subsektor perkebunan sebesar 1,89 juta RT, dan subsektor hortikultura sebesar 1,11 juta RT. Di sisi lain, jumlah RT usaha pertanian mengalami peningkatan 8,7% (dari 26,14 juta menjadi 28,42 juta RT) setelah pada dekade sebelumnya mengalami penurunan 5,09 juta RT.

Hasil ST 2023 terjadi anomali karena RT pertanian justru meningkat. Peningkatan tersebut menjadi mengkhawatirkan karena ada isyarat pertumbuhan sektor di luar pertanian cukup terhambat. Hal yang membuat menjadi lebih mengkhawatirkan adalah karena peningkatan jumlah RT petani diikuti penurunan jumlah usaha pertanian perorangan dan di semua subsektor pertanian. Begitupun diversifikasi usaha tani tiap-tiap RT petani mengalami penurunan (rasio UTP terhadap RUTP menurun dari 1,21 menjadi 1,03) yang dapat berdampak pada pendapatan dan kesejahteraannya (Santosa 2023). Artinya, jika sebelumnya petani padi memiliki ternak, kini hanya padi, sehingga pendapatan dan kesejahteraannya menurun (Santosa 2024).

Selain itu juga terjadi peningkatan persentase petani berlahan sempit < 0,5 ha (petani gurem) dari 55,3% pada 2013 menjadi 62,05% pada 2023, padahal di tahun 2003 ke 2013 sempat mengalami penurunan (dari 63,5% menjadi 55,3%).

Beberapa perkembangan positif, di antaranya peningkatan perusahaan pertanian berbadan hukum sebesar 33,54% dan kenaikan usaha pertanian yang dikelola bersama sebesar 116,08%. Meskipun kedua kelompok tersebut dari sisi jumlah sangat kecil dibandingkan total jumlah usaha pertanian, dimana jenis usaha pertanian

perorangan sangat mendominasi, yaitu sebesar 99,94%.

Usaha pertanian masih didominasi oleh petani berusia  $\geq 45$  tahun. Jumlah petani pada rentang usia tersebut meningkat dari 61,68% di 2013 menjadi 66,44% di 2023. Generasi milenial yang lebih energik hanya 32,32% sedangkan generasi Z hanya 1,24% dari total rumah tangga petani. Pendidikan dan umur menjadi salah satu faktor penting terkait kapasitas petani untuk dapat mengadopsi inovasi dan teknologi baru agar produktivitas usaha taninya meningkat.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani tahun 2013 sebesar 104,70 menjadi 112,44 di tahun 2023. Terjadi peningkatan tajam NTP 2021-2023 yang disumbang oleh peningkatan tajam NTP perkebunan akibat harga minyak nabati dunia yang mengalami kenaikan. Pada 2023, kenaikan NTP dikontribusikan oleh NTP hortikultura dan perkebunan. Adapun NTP tanaman pangan menjadi yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir. NTP tanaman pangan 2013 sebesar 105,47 menjadi 107,61 di tahun 2023 (Santosa 2024).

Beberapa data lainnya yang dapat dikomparasi (Santosa 2023), yaitu devisa ekspor pertanian 2013 sebesar 30,67 miliar USD (jika perkebunan dihilangkan hanya 1,17 miliar USD), impor komoditas pangan 10,07 miliar USD, dan menyumbang surplus neraca perdagangan sektor pertanian 17,94 miliar USD. Adapun di tahun 2022 ekspor komoditas pertanian meningkat menjadi 44,27 miliar USD (jika perkebunan dihilangkan hanya 2,41 miliar USD), impor komoditas pangan 18,65 miliar USD, dan surplus neraca perdagangan sektor pertanian 18,45 miliar

USD. Hal tersebut memperkuat bukti bahwa bantalan perekonomian Indonesia selama terjadi pandemi Covid-19 di sektor pertanian utamanya adalah subsektor perkebunan terutama kelapa sawit (ekspor didominasi subsektor perkebunan (94,56%), terutama sawit). Meskipun demikian penghasilan petani paling tinggi adalah petani tebu (di Lampung), yaitu sekitar Rp 19,6- 22,1 juta/ha (Asmarantaka dkk 2012; Gustiana 2017).

Impor komoditas pangan yang mengalami penurunan paling besar adalah jagung dari 3,29 juta ton (2013) menjadi 1,31 juta ton (2022). Impor kedelai dalam bentuk bungkil dan biji sebesar 5,34 juta ton (2013) dan 8,02 juta ton (2022) dengan ketergantungan impor mencapai 97%. Impor daging sapi 0,047 juta ton (2013) dan 0,231 juta ton (2023). Impor gula 3,44 juta ton (2013) dan 6,02 juta ton (2022) dengan pemenuhan dari impor sebesar 70%. Impor bawang putih 0,443 juta ton 2013 dan 0,575 juta ton (2022) dengan pemenuhan impor hampir 100%. Impor gandum 7,39 juta ton (2013) dan 9,53 juta ton (2022) dimana persentase konsumsi pangan pokok berbasis gandum mencapai 28% dengan pertumbuhan rata-rata konsumsi mi instan sebesar 5%/ tahun. Produksi padi 58,70 juta ton GKG (2013) dan 53,63 juta ton GKG (2023) (Santosa DA 2023; Santosa DA 2024).

### E. Kesimpulan

Kontribusi teoritis yang diberikan oleh kajian ini adalah perlunya ada pergeseran pendekatan pengelolaan pangan pertanian menjadi pendekatan revitalisasi sistem agribisnis. Pendekatan tata niaga yang digunakan adalah rantai nilai yang mendasarkan produksi pada *demand pull* bukan *supply push*.

Penentuan komoditas utama perkebunan hendaknya memperhatikan seberapa besar keterlibatan swasta di dalam komoditas tersebut. Jika keterlibatan swasta sudah cukup besar, maka pemerintah dapat beralih fokus kepada komoditas utama perkebunan lainnya yang berdampak besar terhadap perekonomian namun kepemilikannya masih didominasi oleh petani kecil/ rakyat. Sehingga pemerintah memiliki komoditas unggulan perkebunan lapis kedua, jika komoditas perkebunan lapis pertama mengalami turbulensi.

Hasil penelitian ini memberikan landasan baru agar pemerintah melakukan peremajaan secara terukur pada tanaman perkebunan dan memperkuat agribisnis komoditas pangan yang masih besar nilai impornya namun berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, seperti jagung, susu, dan gula. Pemerintah juga perlu mencari alternatif komoditas perkebunan lainnya sebagai penapis kelapa sawit dalam menopang ekonomi nasional, mempercepat penyediaan bahan baku bagi industri agro yang masih *under utility*, dan menerapkan konsep pertanian regeneratif.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Asmarantaka RW, Baga LM, Suprehatin, Maryono. 2012. Analisis Usaha Tani Tebu Rakyat di Lampung. Di Dalam Krisnamurthi B. (Ed) Ekonomi Gula. Jakarta: Gramedia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas]. 2018. Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. Jakarta: Kedepuitan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan-Bappenas.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas]. 2024. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV 2023*. Edisi Vol. 7, No. 4 Februari 2024. Jakarta: Kedeputan Bidang Ekonomi-Bappenas.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2014a. *Analisis Kebijakan Pertanian Indonesia Implementasi dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2014b. *Analisis Sosial Ekonomi Petani di Indonesia*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2015a. *Ketahanan, Kemandirian, dan Kedaulatan Pangan Indonesia*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2015b. *Transformasi Struktural Usaha Tani dan Petani di Indonesia*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2015c. *Estimasi Parameter dan Pemetaan Efisiensi Produksi Pangan di Indonesia*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2015d. *Dayasaing dan Pemetaan Peremajaan Komoditi Perkebunan*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2015e. *Efisiensi Sistem Produksi dan Tataniaga Hortikultura*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2014. *Sensus Pertanian 2013-Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2023. *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap I*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia [BI]. 2020. *Pangan Nusantara 2020-Memperkuat Pasokan Komoditas Pangan Strategis Melalui Pengembangan Klaster*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia [BI]. 2021. *Pangan Nusantara 2021-Diversifikasi Komoditas Pangan Perkuat Ketahanan Pangan Nasional*. Jakarta: BI.
- Gustiana E. 2017. *Analisis Pendapatan dan Distribusi Pendapatan Usahatani Tebu Rakyat Di Kecamatan Bungamayang Kabupaten Lampung Utara*. Skripsi. Lampung: Unila.
- Krisnamurti B, Harianto. 2017. *Menuju Agribisnis Indonesia yang Berdaya Saing*, Bogor: Departemen Agribisnis IPB.
- Rachmina. 2015. *Evolusi Pendidikan Tinggi Agribisnis Indonesia*. Bogor: Departemen Agribisnis IPB.
- Saragih B. 2010. *Suara dari Bogor-Membangun Opini Sistem Agribisnis*. Bogor: IPB Press.

### **Jurnal**

- Kindagen JG, Kairupan AN, Joseph GH, Rawung JBM, Indrasti R. 2023. *Sustainable Agricultural Development Through Agribusiness Approach and Provision of Location Specific Technology In North Sulawesi*. E3S Web of Conferences: 444: 1-14. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344401003>
- Leitao FO, Paiva EL, Thome KM. 2023. *Agribusiness Capabilities And Performance: A Systematic Literature Review and Research Agenda*. *British Food Journal* 126(2):595-622. <https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2022-114>.
- Machmud, M., Siregar, H., Hariyanto, & Susila, W. R. 2019. *The Role of Rubber Industries on Economic of Jambi Province: A Social Accounting Matrix Approach*. *Indonesian J. Nat. Rubb. Res.:* 37(2), 97-114. <https://doi.org/10.22302/ppk.jpk.v37i2.659>.

- Machmud, M., Siregar, H., Hariyanto, & Susila, W. R. 2022. The Rubber Industry of Indonesia: Strategy for Competitiveness and Sustainability. *European Journal of Business and Management*: 14(3), 52–64. <https://doi.org/10.7176/EJBM/14-3-06>.
- Orrego LMB, Jaramillo N, Grisales JAC, Ceballos YF. 2023. A Systematic Review of The Evaluation of Agricultural Policies: Using Prisma. *Heliyon* 9: 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20292>.
- Popp TR. 2021. Explaining Policy Convergence and Divergence through Policy Paradigm Shifts: A Comparative Analysis of Agricultural Risk Governance in OECD Countries. *Journal of Comparative Policy Analysis* 23(3): 310-327. <https://doi.org/10.1080/13876988.2019.1674623>
- Rahayu, E. S. 2020. Prospektif Pengembangan Agribisnis yang Berorientasi Pada Potensi dan Karakteristik Wilayah. *Prosiding Seminar Agribisnis 2020*: 1–7.
- Sudaryanto, T., Iqbal, M., .... 2016. Tingkat Dukungan Domestik untuk Sektor Pertanian Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*: 14(1), 73–82.
- Trevors J, Saier M. 2010. AgriBusiness versus AgriCulture. *Water, Air, and Soil Pollution* 205: 35-36.
- Wuepper D, Wiebecke I, ...2024. Agri-environmental policies from 1960 to 2022. *Nature Food* 5: 323-331. <https://doi.org/10.1038/s43016-024-00945-8>.

### **Website**

- Santosa DA. 2023. “Sensus Pertanian 2023 dan Senja Kala Pertanian”. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/14/sensus-pertanian-2023-dan-senja-kala-pertanian>, diakses 20 Juni 2024.
- Santosa DA. 2024. “Pangan dalam Debat”. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/19/pangan-dalam-debat-1>, diakses 21 Juni 2024.